

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	100	92,11	92,11
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	Persentase	100	100	103,28	103,28
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	100	123,42	120
II	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	100	40	40	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	100	40	40	100
III	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang					

3.1	Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	4 dari 4	120
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	92	40	40	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
2. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8%-2%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

Capaian =

$$\frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8%-2%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan

pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan II tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas telah terealisasi sebesar 1,66% (Data BPS Triwulan I 2026) dari target tahun 2026 sebesar 1,8%-2%. Sehingga capaian kinerja triwulan II tahun 2026 telah mencapai sebesar 92,11% ($1,66/1,8 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	92,11	92,11

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas diarahkan pada pengembangan proyek hilirisasi batubara, khususnya melalui implementasi teknologi gasifikasi untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah seperti metanol dan *dimethyl ether* (DME).

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,66% pada triwulan I tahun 2025 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 1,8%-2% tersebut dapat tercapai atau bahkan melampaui batas bawah, apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui percepatan pengembangan hilirisasi batubara, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi batubara dan pengilangan migas.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan II tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi penyiapan proyek DME (kebutuhan <i>feasibility</i> , teknologi, kemitraan, pendanaan, dan distribusi)	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil untuk skema bisnis akan dibahas dengan Danantara, dan proses COD pada tahun 2030. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan Dimethyl Ether (DME) pada tanggal 24 April 2026 di Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan hasil <i>Groundbreaking</i> Proyek <i>Coal to DME</i> akan dilaksanakan pada 29 April 2026 di Cilacap (secara <i>online</i>). • Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Kajian <i>Dimethyl Ether</i> (DME) pada tanggal 8 Mei 2026 di Jakarta (Melalui Zoom) dengan hasil akan mempersiapkan kajian terhadap skenario distribusi, teknologi yang digunakan serta keekonomian DME.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti Zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu

- Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendorong kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendorong kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.
- Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia diluar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi
- Mengingat DME 100% belum sepenuhnya kompatibel dengan peralatan eksisting, sehingga diperlukan penyesuaian peralatan (kompor) dan kebijakan pendukung

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Government* (ESG)
- Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur capex, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG
- Koordinasi percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional.
- Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
- Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

1.2. Persentase

Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri logam dasar dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8% - 1,1%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar}}{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8%-1,1%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan II tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar telah terealisasi sebesar 1,14% (Data BPS Triwulan I 2026) dari target tahun 2025 sebesar 0,8%-1,1%. Sehingga capaian kinerja triwulan II tahun 2026 telah mencapai sebesar 103,28% ($1,14/1,1 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi I	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri	Persentase	100	103,28	103,28

Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar				
--	--	--	--	--

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar diarahkan pada pengembangan hilirisasi nikel (*stainless steel*, baterai, dan kendaraan listrik), bauksit (alumina dan aluminium), tembaga (katoda tembaga dan/atau *copper wire*, *copper rod*, *copper tube*), timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah), serta pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 berkenaan dengan kendala Perizinan Berusaha *smelter* nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 1,14% pada triwulan II tahun 2026 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi Sub-sektor Industri Logam Dasar terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 0,8%-1,1% dapat tercapai hingga akhir tahun 2026 apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui pengembangan pengolahan nikel, timah, bauksit, dan tembaga, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi logam dasar pada komoditas mineral lainnya.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan II tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi penyelesaian isu percepatan hilirisasi	Terlaksana	• Telah dilaksanakan FGD Pemetaan Regulasi dan

	nikel (<i>stainless steel</i> , baterai, dan mobil EV)		Penguatan Kebijakan Pengelolaan Limbah Baterai KBLBB di Indonesia pada tanggal 21 April 2026 di Jakarta dengan hasil perlu adanya dukungan regulasi/kebijakan untuk mengembangkan industri pengelolaan limbah baterai KBLBB di Indonesia. • Telah dilaksanakan <i>Senior Officials' Meeting</i> (SOM) pada tanggal 19 Mei 2026 di Jakarta dengan hasil : i) Rapat menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk melanjutkan kerja sama dalam kerangka <i>EV Mechanism</i>; ii) Menyetujui penguatan kerja sama pada sektor kendaraan listrik, baterai, mineral kritis dan hilirisasi industri; iii) Mendorong keberlanjutan proyek-proyek riset bersama yang telah berjalan serta penyusunan proyek lanjutan yang bernilai strategis; iv) Menyepakati pentingnya pengembangan kerja sama pada elektrifikasi kendaraan roda dua, kendaraan tambang dan ekonomi sirkular baterai; v) Menugaskan para pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil rapat; vi) Menetapkan bahwa seluruh kerja sama akan diarahkan pada hasil yang menguntungkan kedua negara.
--	---	--	---

2	Koordinasi penyelesaian isu percepatan hillirisasi bauksit (alumina dan aluminium)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan PSN Pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh PT Tianshan Alumina Indonesia pada tanggal 2 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil masih diperlukan timeline pelaksanaan kunjungan dan verifikasi lapangan terkait lahan pengganti, penyesuaian data OSS dan NKU akibat perubahan lokasi proyek serta implikasinya terhadap fasilitas Tax Holiday. - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada tanggal 29 Juni 2026 di Jakarta dengan hasil i) Diperlukan percepatan revisi RTRWN dan PP 21 Tahun 2021 guna mengakomodir dermaga yang dimiliki PT WHW, ii) kebutuhan lahan untuk area water intake dan kegiatan transshipment akan diakomodir dalam revisi RTRW Kabupaten Ketapang.
3	Koordinasi penyelesaian isu	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi

	percepatan hilirisasi tembaga (katoda tembaga dan/atau copper wire, copper rod, copper tube)		Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil Fasilitas Pemurnian Tembaga yang terintegrasi dengan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa direncanakan akan dilakukan prakonstruksi pada Q3 Tahun 2026 dan COD pada Q4 Tahun 2030. Telah dilaksanakan <i>Groundbreaking Smelter</i> Emas dan Tembaga pada tanggal 29 April di Gresik dengan hasil proyek hilirisasi tembaga melalui produksi <i>brass mill</i> dan <i>brass cup</i> dengan kapasitas produksi 10.000 ton pertahun yang diarahkan untuk mendukung industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) pertahanan.
4	Koordinasi penyelesaian isu percepatan hilirisasi timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil Hilirisasi Pertimahan dan Ketahanan Energi di Provinsi Riau, Kep. Riau, dan Bangka Belitung perlu mencantumkan kegiatan rantai pasok pemenuhan kebutuhan timah serta

			ruang lingkup tidak hanya timah namun juga terhadap mineral ikutan.
5	Koordinasi penyelesaian isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi yang telah lengkap persyaratan dasarnya	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat dengan Fajar Metal Industry pada tanggal 10 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil dibuatnya Surat Pernyataan Komitmen dari PT Fajar Metal Industry bahwa Memproses produk antara berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang berasal dari PT Fajar Metal Industry (PT FMI), PT Teluk Metal Industry (PT TMI), dan PT Chengsheng New Energy (PT CNE) sebagai bagian dari komitmen hilirisasi industri nikel di Indonesia. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perizinan Berusaha Smelter yang Telah Konstruksi Pasca Terbitnya PP 28 Tahun 2025 pada tanggal 19 Mei 2026 di Jakarta dengan hasil: 1) Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada 10 smelter yang telah memiliki persyaratan dasar dan 14 smelter yang telah memperoleh KKPR, Persetujuan Lingkungan dan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah telah mengajukan PBG sebelum 5 Oktober 2025 sepanjang dilengkapi dengan SKTJM dari Pemerintah

			Daerah; 2) SKTJM sebagaimana dimaksud perlu mencakup beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian; 3) berdasarkan kriteria SKTJM dimaksud, sebanyak 3 smelter telah memenuhi kriteria, 8 smelter perlu melakukan revisi sesuai catatan; dan sebanyak 3 smelter mengundurkan diri.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan Harga Patokan Emas (HPE) dan Harga Referensi (HR) Produk Pertambangan Periode I Mei 2026 pada tanggal 27 April di Jakarta (melalui Zoom) dengan hasil HPE yang digunakan 153.194,87 USD/kgm dan HR yang digunakan 4.764,9 USD/troy ounce.
- Workshop Standar Keamanan dan Keselamatan BESS untuk Mendukung Transisi Energi pada tanggal 6-7 Mei 2026 di Jakarta dengan hasil diperlukan penyusunan skema pengelolaan limbah baterai BESS, penetapan pihak penanggung jawab, mekanisme pengumpulan dan recycling baterai bekas, dan penguatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3.
- FGD Validasi Kajian Analisis Situasional dan Pengembangan Pilot Project untuk Pengumpulan dan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik pada 29 Juni 2026 di Jakarta dengan hasil usulan lokasi pilot project berada di Jabodetabek dan perlu kejelasan mengenai pihak yang akan menanggung biaya dalam proses pengumpulan dan daur ulang baterai.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

- Terdapat isu tumpang tindih lahan dalam pembangunan proyek hilirisasi bauksit (alumina dan aluminium) yang dapat menghambat pembangunan proyek.
- Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pengumpulan dan daur ulang limbah baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), sehingga menghambat terbentuknya ekosistem pengelolaan baterai pada akhir masa pakai.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi bauksit yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional.
- Dukungan regulasi guna menjamin ketersediaan fasilitas pengumpulan dan daur ulang limbah baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

1.3. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral

Latar Belakang

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan pembangunan hilirisasi industri mineral sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi nasional berbasis peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi Industri mineral berperan langsung dalam memperluas basis industri pengolahan dalam negeri, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekosistem industri lanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah proyek hilirisasi mineral prioritas yang menjadi pengungkit utama pencapaian target pembangunan industri nasional.

Indikator Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral mengukur pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yaitu pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Smelter Mineral Baru}}{\text{Rencana Pengembangan Smelter Mineral Baru}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rata-rata persentase capaian pembangunan untuk 8 *smelter* yang dikoordinasikan yaitu sebesar 65%, berdasarkan data perencanaan pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan tersebut.

Pada triwulan II tahun 2026, rata-rata persentase capaian pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan telah terealisasi sebesar 67,88% dari target triwulan II tahun 2026 sebesar 55%. Sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2026 telah mencapai sebesar 123,42% ($67,88/55 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% (kinerja maksimal 120%) dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	123,42	120

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan merupakan *cascading direct* dari Indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri mineral adalah melalui penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan mineral antara lain

Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi percepatan pembangunan 7 (tujuh) <i>smelter</i> nikel di Kabupaten Luwu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Halmahera Tengah	Terlaksana	Telah dilaksanakan inventarisir progres pembangunan fisik fasilitas pengolahan mineral pada 30 Juni 2026. Berdasarkan data yang diperoleh, sampai dengan triwulan I tahun 2026, pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Kolaka Nickel Indonesia telah mencapai 77%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Bumi Mineral Sulawesi telah mencapai 100%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Bukaka Mandiri Sejahtera telah mencapai 23%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Stargate Mineral Asia telah mencapai 73%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Blue Sparking Indonesia telah mencapai 100%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Guang Ching Nickel

			Cobalt telah mencapai 70; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT QMB New Energy Minerals telah mencapai 100%.
2	Penajaman rencana aksi pembangunan <i>smelter</i> alumina dan aluminium di Kabupaten Mempawah	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan List Permasalahan Pengembangan Program Ekosistem Aluminium pada tanggal 17 Juni 2026 di Jakarta dengan hasil perlu pembahasan mengenai eksekusi lahan hauling road fase I, mekanisme skema lahan untuk PLTU serta pengembangan kapasitas pelabuhan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

- Masih diperlukan penyelesaian proses penerbitan sertifikat untuk fasilitas *tailing landfill* SGAR I dan SGAR II
- Proses eksekusi lahan untuk pembangunan lahan *Hauling Road* Fase I a.n Arit belum sepenuhnya terselesaikan
- Penetapan status obvitnas untuk SGAR I masih dalam proses menunggu informasi dari Biro Hukum Kemenperin
- PT MIND ID belum menyampaikan surat arahan dan kebijakan kepada BKPM terkait pemakaian SHPP Bauksit tanpa aspek transaksional di internal lingkungan Group MIND ID
- Kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Kijing masih terbatas sebagai dampak dari pembangunan proyek SGAR II dan Smelter Aluminium

- Diperlukan pengajuan revisi perluasan PKKPR untuk proyek Smelter Aluminium

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna perluasan PKKPR.
- Koordinasi dengan PT Pelindo mengenai kajian *inbound* dan *outbound* dengan adanya keglatan pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium.
- Koordinasi lebih lanjut terkait progres dan kendala pembangunan SGAR II dan Smelter Aluminium di Kabupaten Mempawah.
- Koordinasi penyelarasan data dan informasi terkait progres dan kendala pembangunan smelter untuk mendukung percepatan pembangunan smelter nikel.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

% efektivitas SKP = % Tahapan Pertama + % Tahapan Kedua + % Tahapan Ketiga + % Tahapan Keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan. Adapun target triwulan I 2026 sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 4 (empat) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen.

Hingga triwulan I tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara telah tercapai dengan diterbitkannya 4 (empat) dokumen yaitu Undangan Rapat Koordinasi Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026, Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan DME pada tanggal 24 April 2026, Undangan Rapat Sinkronisasi Kajian DME pada tanggal 8 Mei 2026, Kajian Strategi mencapai keekonomian pengembangan DME dari Batubara terhadap LPG. Sehingga realisasi triwulan II sebesar 40% atau mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan II tahun 2026 sebesar 40% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	40	40	100 %

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan II tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pelaku usaha baik BUMN maupun swasta guna mendorong percepatan proyek strategis nasional gasifikasi batubara. Fokus gasifikasi batubara diarahkan pada proyek utama, yakni *coal-to-DME* di Sumatera Selatan.

Dengan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, diharapkan proyek hilirisasi batubara (DME) yang menjadi bagian penting dari strategi transformasi sektor energi dan industri nasional dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional. Hal ini selaras dengan agenda strategis Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam periode 2025-2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan Danantara untuk membahas mengenai skema bisnis. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan <i>Dimethy Ether</i> (DME) pada tanggal 24 April 2026 di Gedung Kwatir Nasional Gerakan Pramuka dengan hasil ditindaklanjuti melalui kegiatan <i>Ground Breaking</i> Proyek <i>Coal to DME</i> pada 29 April 2026 di Cilacap (secara <i>online</i>). - Telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Kajian <i>Dimethyl Ether</i> (DME) pada tanggal 8 Mei 2026 di Jakarta (Melalui <i>Zoom</i>) dengan hasil ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan selanjutnya terkait persiapan kajian terhadap skenario distribusi, teknologi yang digunakan serta keekonomian DME.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendorong kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendorong kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.
2. Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia diluar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi
3. Mengingat DME 100% belum sepenuhnya kompatibel dengan peralatan eksisting, sehingga diperlukan penyesuaian peralatan (kompur) dan kebijakan pendukung.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Government (ESG)*
2. Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur capex, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG
3. Koordinasi percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional.
4. Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
5. Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait hilirisasi industri mineral kritis diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja keasdepan. Adapun target triwulan II 2026 sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 4 (empat) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen

Hingga triwulan II tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis telah tercapai dengan diterbitkannya 4 (empat) dokumen yaitu Undangan *Steering Committee Meeting* Kerja Sama "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" /Lanjutan *Discussion on EV Mechanism Workplan* pada tanggal 26 Januari 2026, Undangan FGD Pemetaan Regulasi dan Penguatan Kebijakan Pengelolaan Limbah Baterai KBLBB di Indonesia pada tanggal 21 April 2026, Undangan *Senior Officials' Meeting* (SOM) pada tanggal 19 Mei 2026, Undangan Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada tanggal 29 Juni 2026. Sehingga realisasi triwulan II sebesar 40% atau mencapai 200% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan II tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	20	40	100%

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis merupakan *cascading Indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3 dari 4.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis pada triwulan I tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pemangku kepentingan industri seperti Indonesia Battery Corporation (IBC). Fokus utama diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan industri baterai di Halmahera dan Karawang, termasuk fasilitasi penyelesaian perizinan, pelepasan kawasan hutan, dan penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mendukung investasi di sektor hilir mineral berbasis nikel.

Di samping upaya dalam negeri, penguatan kerja sama internasional juga menjadi prioritas strategis. Pada periode pelaporan, dilakukan tindak lanjut atas *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait pengembangan Baterai EV. Kerja sama ini

mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun rantai pasok regional yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang pengolahan dan pemurnian mineral, pengembangan teknologi hijau, serta fasilitasi investasi bilateral. Sebagai bentuk konkret, telah disepakati pembentukan *Working Group* bilateral yang bertugas merumuskan langkah strategis dan rencana aksi bersama dalam pengembangan mineral kritis.

Selain itu, kerja sama Indonesia–Australia ini akan diperkuat melalui pertukaran data dan informasi, pemetaan peluang investasi bersama, serta harmonisasi standar keberlanjutan. Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan memfasilitasi penyalarsan kebijakan antar sektor untuk mendukung implementasi kerja sama tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri nasional, memperluas akses pasar global, serta mendukung pencapaian target Asta Cita dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis			
N o	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan PSN Pembangunan Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh PT Tianshan Alumina Indonesia, pada tanggal 02 April 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan mengenai timeline pelaksanaan kunjungan dan verifikasi lapangan terkait lahan pengganti, penyesuaian data OSS dan NKU akibat perubahan lokasi proyek serta implikasinya terhadap fasilitas Tax Holiday

			• Telah dilaksanakan Rapat Perizinan Berusaha <i>Smelter</i> yang Telah Konstruksi Pasca Terbitnya PP 28 Tahun 2025 pada tanggal 4 Mei 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan lebih lanjut mengenai 11 perusahaan yang telah menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SK TJM) dan 3 perusahaan yang mengajukan menjadi salah satu rantai pasok Tsingshan Group. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada tanggal 29 Juni 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan i) koordinasi percepatan revisi RTRWN dan PP 21 Tahun 2021 guna mengakomodir dermaga yang dimiliki PT WHW, ii) kebutuhan lahan untuk area water intake dan kegiatan transshipment akan diakomodir dalam revisi RTRW Kabupaten Ketapang
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan terkait Aduan PT Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Park pada tanggal 7 April 2026 melalui Zoom.
- Rapat Fasilitasi PT Nicole Metal Industry pada 11 Juni 2026 melalui Zoom

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti Zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga

proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Konstruksi pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit oleh PT Tianshan Alumina Indonesia belum dapat dilaksanakan karena masih adanya tumpang tindih dengan kawasan Latihan TNI AL, dan status lahan pengganti *clean and clear*.
2. Perubahan lokasi lahan memerlukan penyesuaian data OSS, PKKPR, dan Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang menjadi dasar pemberian fasilitas Tax Holiday.
3. Terbitnya Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat memberikan dampak terhadap Perizinan Berusaha yang dimiliki PT WHW meliputi: i) 3 Dermaga berada diluar Garis Pantai, ii) Dermaga Manual I dan Dermaga Manual II mengalami tumpang tindih dengan Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pariwisata, iii) 47 hektar dilokasi water intake berstatus kawasan pertanian, iv) kebutuhan 12,5 hektar untuk kegiatan transshipment.
4. Belum tersedia mekanisme pengendalian kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi, yang diperlukan untuk memastikan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil rapat koordinasi serta konsistensi pelaksanaan komitmen kementerian/lembaga terkait dalam pengembangan hilirisasi industri mineral kritis khususnya ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pelaksanaan kunjungan dan verifikasi lapangan oleh Kemenhan/ TNI AL dan keputusan atas lahan pengganti.
2. koordinasi antara PT Tianshan dengan BKPM terkait penyesuaian data OSS dan NKU akibat perubahan lokasi proyek serta implikasinya terhadap fasilitas Tax Holiday.
3. Koordinasi pembahasan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini masih dalam proses. Penetapan revisi RTRWN ini akan menjadi acuan dalam revisi RTRWP Kalimantan Barat.
4. Koordinasi penyusunan rencana aksi pengembangan hilirisasi industri mineral kritis khususnya ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel untuk memastikan tindak lanjut atas kesepakatan dan komitmen kementerian/lembaga terkait.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi,

Koordinasi, dan

Pengendalian

Kebijakan di Bidang

Pengembangan

Hilirisasi Industri

Pertambangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan kepada stakeholders. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, dan akademisi yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan pada tahun 2026 berdasarkan hasil survei adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada standar minimal layanan yang diberikan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada triwulan II tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang diperoleh sebesar 4 dari 4 (Sangat Puas) atau mencapai 133,33% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan II tahun 2026 sebesar 4, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	3 dari 4	4 dari 4	120

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan cascading direct dari Indikator Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4. Survei kepuasan layanan dilaksanakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Survei ini dilakukan untuk periode semester I tahun 2026 dengan melibatkan 23 responden yang sepanjang periode tersebut menggunakan layanan unit kerja Asisten Deputy Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan. Survei ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pertanyaan skala 1-4 dan 1 (satu) pertanyaan terbuka, meliputi aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan kepuasan substansi layanan, serta kritik dan saran. Kuesioner disebarluaskan secara online dengan menggunakan media Google Form.

Berdasarkan hasil survei terhadap 23 responden, rata-rata nilai kepuasan terhadap unit kerja Asisten Deputy Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan adalah sebesar 3,92. Mengacu pada ketentuan dalam manual IKU perspektif customer, nilai tersebut berada dalam rentang 3,51 hingga 4,00 dan termasuk dalam kategori "Sangat Puas", dengan indeks sebesar 4. Melalui pertanyaan terbuka, para responden juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya usulan untuk memperluas pelibatan akademisi, praktisi, dan asosiasi dalam proses koordinasi pada periode mendatang.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester I 2026.
2.	Penyusunan laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan Semester I 2026	Terlaksana	Telah disusun laporan hasil survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan semester I 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya korespondensi surat dan komunikasi dengan *stakeholders* melalui platform digital, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi isu di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi terhadap hasil survei kepuasan layanan semester I tahun 2026 pada area yang memerlukan perbaikan, serta melaksanakan strategi yang sesuai untuk mencapai kinerja yang lebih baik di periode mendatang.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dibandingkan tahun sebelumnya dan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia dan

sumber daya anggaran yang ada. Adapun target triwulan I ditetapkan sebesar 20%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026.

Hingga triwulan II tahun 2026, terdapat 5 (lima) dokumen bukti dukung RB yang dihasilkan yaitu Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Matriks Peran Hasil, dan SK Tim Kerja. Dari 5 (lima) dokumen tersebut yang telah diselesaikan sesuai dengan standar sejumlah 5 (lima) dokumen. Sehingga realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 20% atau kinerja mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan I tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	40	40	100 %

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan cascading indirect dari indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Dalam mencapai target tersebut, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dirinci diuraikan secara rinci pada rencana aksi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah disusun laporan kinerja Triwulan II 2026.
2	Penyusunan Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan revisi Renja 2026.

3	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan II Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaporkan capaian RO Prioritas Nasional triwulan I tahun 2026.
4	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDi	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis 2026 pada 12 Mei 2026. • Telah dilaksanakan <i>Entry Meeting</i> Pengawasan Kearsipan Internal pada 3 Juni 2026. • Telah dilaksanakan Validasi Formulir ASKI Pengawasan Kearsipan Internal 2026 pada 17 Juni 2026.

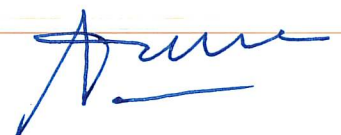
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pengurangan penggunaan kertas dengan mengoptimalkan penggunaan dokumen digital dalam persuratan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi (RB) telah diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.

Jakarta, 9 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan



Agus Wibowo